

**PENGARUH BELANJA MODAL, *INTERGOVERNMENTAL
REVENUE, LEVERAGE, SIZE*, DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA DAN KABUPATEN DI PULAU JAWA
TAHUN 2014**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ROKHIM NOVYANDRA
B 200 120 251

**PROGAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH BELANJA MODAL, *INTERGOVERNMENTAL
REVENUE, LEVERAGE, SIZE*, DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA DAN KABUPATEN DI PULAU JAWA
TAHUN 2014**

PUBLIKASI ILMIAH

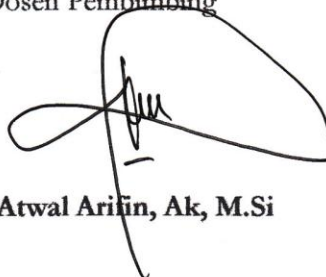
oleh:

ROKHIM NOVYANDRA

B 200 120 251

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Drs. Atwal Ariin, Ak, M.Si

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH BELANJA MODAL, *INTERGOVERNMENTAL REVENUE, LEVERAGE, SIZE*, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DAN KABUPATEN DI PULAU JAWA TAHUN 2014

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

OLEH




ROKHIM NOVYANDRA

B 200 120 251

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 23 April 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Drs. Atwal Arifin, Ak, M.Si
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. M. Abdul Aris, M.Si
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. Wahyono, M.A, Ak
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,



Dr. Wahyono, M.Si



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417 Surakarta - 57102

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROKHIM NOVYANDRA**
NIM : **B 200 120 251**
Jurusan : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **“PENGARUH BELANJA MODAL, INTERGOVERNMENTAL REVENUE, LEVERAGE, SIZE, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DAN KABUPATEN DI PULAU JAWA TAHUN 2014 “**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah publikasi yang saya buat dan serahkan ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti dan atau dapat dibuktikan bahwa skripsi hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan atau gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Surakarta, 23 April 2016
buat pernyataan,

(ROKHIM NOVYANDRA)



**PENGARUH BELANJA MODAL, *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*,
LEVERAGE, *SIZE*, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DAN KABUPATEN DI
PULAU JAWA TAHUN 2014**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

ABSTRAK

Munculnya TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan Indonesia” telah memberikan tanggungjawab terhadap pemerintah daerah yang cukup besar. Tanggungjawab tersebut salah satunya dapat dibuktikan dengan kinerja pemerintah daerah. Kinerja merupakan gambaran tentang pencapaian visi, misi, dan tujuan dari suatu organisasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh belanja modal, *intergovernmental revenue*, *size*, *leverage* dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota dipulau jawa pada tahun anggaran 2014. Total sampel penelitian ini adalah 43 pemerintah daerah kabupaten/kota yang diambil dengan menggunakan purposive sampling. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal dan *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Sedangkan *size*, *leverage* dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa.

Kata Kunci : belanja modal, *intergovernmental revenue*, *leverage*, *size*, pendapatan asli daerah, kinerja pemerintah daerah.

Abstract

The emergence of MPR Decree No. XV/MPR/1998 on "Implementation of Autonomous Regions, Distribution and Utilization of National Resources Fair Indonesia" has responsibility for local government that is big enough. Responsibility is one of them can be evidenced by the performance of pemerintah daerah area. Performance is the picture of the achievement of the vision, mission, and goals of an organization. This research was conducted in order to obtain empirical evidence related to the effect of capital expenditures, the intergovernmental revenue, size, leverage and local revenues on the financial performance of local governments.

The population of this research is all local government district / city island of Java in fiscal year 2014. The total sample of this research are 43 local government district / city are taken by using purposive sampling. Data were analyzed using multiple linear regression analysis results showed that capital spending and intergovernmental revenue significantly influence the financial performance of local government districts / cities in Java. As for size, leverage and local revenues do not affect the financial performance of local government districts / cities in Java.

Keywords : capital expenditure, intergovernmental revenue, leverage, size, local revenue, local government performance.

A. PENDAHULUAN

Krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi pada awal tahun 1996 dan puncaknya pada tahun 1997 memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi perekonomian dan menuntut pemerintah agar mampu melaksanakan reformasi di segala bidang. Hal ini mendorong pendelegasian sebagian wewenang pemerintah pusat untuk pengelolaan keuangan kepada daerah, agar daerah mampu membiayai pembangunan dan pelayanan atas dasar keuangan sendiri. Selain hal tersebut, pemerintah daerah ingin memberikan pelayanan yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat serta kebutuhan dan keinginan rakyat mengenai kinerja pemerintah daerah semakin besar dan kritis, terutama semenjak era-reformasi yang melahirkan ketetapan MPR yaitu TAP MPR nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat, sehingga pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan APBD kepada masyarakat berupa laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas kepada publik. Pemerintah tidak hanya mempertanggungjawabkan uang yang dipungut dari rakyat, tapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapainya.

Bastian (2006) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi dalam Minarsih, 2015). Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial, seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat (Mardiasmo, 2009:123). Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di daerah tersebut.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah *size*, pendapatan asli daerah, *leverage*. Selain itu peneliti menambahkan variabel independen lain yaitu belanja modal dari penelitian Simanullang (2013) dan variabel *intergovernmental revenue* yang merujuk pada penelitian Sesotyaningtyas (2012).

Dengan memperhatikan latar belakang dan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh belanja modal, *intergovernmental revenue*, *size*, *leverage*, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan memperhatikan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menunjukkan akuntabilitas dan transparansi kepada publik, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah belanja modal, *intergovernmental revenue*, *size*, *leverage*, dan

pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi berupa masukan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan keuangan pemerintah daerah masa yang akan datang yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh belanja modal, *intergovernmental revenue*, *size*, *leverage*, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

B. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Teori Keagenan

Pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) memiliki kepentingan untuk menyampaikan sebuah informasi. Kepentingan itu menjadi dasar munculnya teori keagenan yang menggambarkan hubungan antara *principal* dan *agen* dalam penelitian tentang kinerja keuangan pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh belanja modal, *intergovernmental revenue*, *leverage*, *size* dan pendapatan asli pemerintah daerah. Minarsih (2015) menyatakan bahwa *agency theory* banyak memberikan dampak negatif berupa perilaku *oportunistik* (*opportunistic behavior*). Hal ini terjadi tidak lepas dari kaitannya dengan masalah *information asymmetry* antara pihak pemerintah yang memiliki informasi keuangan yang lebih banyak daripada pihak prinsipal.

Di sisi lain, pihak pemerintah pun dapat menggunakan kewenangan/kekuasaan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau tindak korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*.

2. Akuntabilitas

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja *financial* pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut (Mardiasmo, 2009). Mahsun (2006) menyatakan bahwa salah satu bentuk akuntabilitas publik dapat berupa transparansi laporan keuangan. Transparansi berarti bahwa individu, *group*, atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi yang tersembunyi, dan bahwa seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan menghilangkan data yang memiliki hubungan dengan masalah tertentu

3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Minarsih, 2015).

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Perhitungan APBD (Laporan

Realisasi Anggaran), Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca. Bagi pihak eksternal, LKPD yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja (Surepno, 2013).

4. **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD)**

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi dalam Minarsih, 2015). Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial, seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan.

Penilaian/pengukuran kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak hanya berlaku pada lembaga atau organisasi yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (Sesotyaningtyas, 2012).

5. **Belanja Modal (BM)**

Dalam PP No. 24 Tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas bulan). Belanja modal digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya.

Sudarsana (2013) menyatakan bahwa belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Sehingga semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja daerah akan lebih baik. Oleh karena itu, hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₁ : Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda kabupaten/kota.

6. **Intergovernmental Revenue (IR)**

Intergovernmental revenue adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya

pembayaran kembali (Patrick, 2007). *Intergovernmental revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan Simanullang (2013). Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Pemberian dana perimbangan ini akan dipantau penggunaannya oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, semakin besar dana perimbangan maka pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat sehingga diharapkan akan membuat pemerintah daerah akan semakin berhati-hati dalam pelaksanaan program kerjanya. Hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya karena sumber keuangannya berasal dari pihak eksternal. Dengan demikian, semakin besar dana perimbangan akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Dari uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda kabupaten/kota.

7. **Leverage (LEV)**

Leverage berhubungan dengan penggunaan aktiva atau dana dimana penggunaan aktiva tersebut pemerintah daerah harus menutup biaya tetap atau beban tetap. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan program pembangunan daerah perlu adanya dana yang bersumber dari APBD, namun adakalanya pendapatan daerah tidak mampu menutupi belanja daerah sehingga terjadi defisit anggaran. Untuk itu pemerintah daerah harus mengupayakan adanya sumber pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran tersebut. Sumber pembiayaan tersebut dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang (Halim, 2014)

Pemerintah daerah yang memiliki *leverage* yang besar maka diprediksi memiliki tingkat resiko yang besar. Menurut Sumarjo (2010), *leverage* merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas. Semakin besar *leverage* semakin menunjukkan entitas tidak mampu dalam membiayai operasionalnya sendiri karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Sedangkan semakin kecil *leverage* semakin besar kemampuan entitas dalam membiayai operasional melalui dana internal. Hal itu menunjukkan bahwa semakin besar *leverage* yang dimiliki oleh suatu entitas maka semakin buruk kinerja entitas tersebut atau sebaliknya (Sumarjo, 2010). Dari uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₃: *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda kabupaten/kota.

8. **Size (SZ)**

Nasser dalam Kusumawardani (2012) menyatakan *size* adalah suatu nominal yang dapat mendeskripsikan sesuatu. Sebagai informasi bahwa *size* perusahaan yang diukur dengan menggunakan total aktiva akan lebih baik karena nilai aktiva

relatif stabil dibandingkan dengan nilai penjualan dan kapitalisasi pasar dalam mengukur *size* perusahaan.

Ukuran daerah yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberikan pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012).

Sumarjo (2010) melakukan penelitian mengenai ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset. Hasil dari penelitiannya menunjukkan secara empiris bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sudarsana (2013) menjelaskan bahwa tujuan utama dari program kerja Pemda adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset Pemda, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemda tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian yang akan diuji adalah:

H₄ : *Size* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda kabupaten/kota.

9. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain- lain PAD yang sah

Julitawati (2012) menyatakan bahwa kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pengembangan daerah tersebut. Disamping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumarjo (2010) menjelaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi disuatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian yang akan diuji adalah:

H₅ : Pendapatan Asli Daerah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda kabupaten/kota

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:13).

2. Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2014. Sedangkan sampel diperoleh dari pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau jawa tahun anggaran 2014 yang mempunyai Laporan Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Terdapat Laporan Neraca untuk mendapatkan total aset, total utang, dan total modal yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun anggaran 2014.
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa yang dipilih memiliki semua data yang lengkap meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), Dana Perimbangan, Total Realisasi Belanja dan Total Realisasi Pendapatan tahun anggaran 2014.

3. Definisi Operasional Variabel Dan Pengukurannya

Variabel yang diuji dalam penelitian ini terdiri atas tiga variabel bebas (independen) yaitu belanja modal, *intergovernmental revenue*, *leverage*, *size* dan pendapatan asli daerah serta variabel terikat (dependen) yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.

a. *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) (Y)*

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini diproksikan dengan indeks kapasitas fiskal daerah yang terdapat di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2015.

b. *Belanja Modal (BM) (X₁)*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2012) menyatakan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk membiayai belanja modal. Maka pada penelitian ini variabel belanja modal diukur dengan rumus sebagai berikut::

$$BM = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja}}$$

c. *Intergovernmental Revenue (IR) (X₂)*

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Maka pada penelitian ini variabel *intergovernmental revenue* diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$IR = \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

d. **Leverage (LEV (X₃))**

Sumber pembiayaan tersebut dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang (Halim, 2014:192-193) *leverage* dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Debt to Equity} = \frac{\text{Debt}}{\text{Equity}}$$

e. **Size (SZ)**

Pada penelitian ini total aktiva atau aset diprosikan seperti penelitian Minarsih (2015) yaitu dengan logaritma natural dari total aset ((Ln) aktiva). Hal ini dikarenakan besarnya total aset masing-masing pemerintah daerah berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrem. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total aset perlu di Ln kan.

f. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini dihitung dengan rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan yang mencerminkan porsi pendapatan asli daerah dalam pendapatan daerah. Maka pada penelitian ini variabel pendapatan asli daerah diukur dengan rumus :

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

4. **Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis yang meliputi analisis regresi lenier berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi (R²). Sebelum melakukan uji hipotesis dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, serta heteroskedastisitas. Bentuk persamaan dalam penelitian ini adalah:

$$\text{KKPD} = \alpha + \beta_1 \text{BM} + \beta_2 \text{IR} + \beta_3 \text{LVRG} + \beta_4 \text{SZ} + \beta_5 \text{PAD} + \varepsilon$$

Keterangan :

KKPD	: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
β_1, \dots, β_5	: Koefisien Variabel Independen
BM	: Belanja Modal
IR	: <i>Intergovernment Revenue</i>
LEV	: <i>Leverage</i>
SZ	: <i>Size</i>
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
ε	: Koefisien error

D. **HASIL PEMBAHASAN**

A. **Deskripsi Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kota dan kabupaten di pulau jawa tahun 2014. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive*

sampling untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan kriteria-kriteria pengambilan sampel, diperoleh sampel sejumlah 43 pemerintah daerah.

B. Pengujian Regresi Linier Berganda

Tabel 1
Tabel Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	t _{-hitung}	Sign.	Simpulan
Konstanta	-0,291	-0,073	0,942	
Belanja Modal (BM)	1,774	4,107	0,000	Berpengaruh Signifikan
Intergovernmental Revenue (IR)	-1,874	-3,837	0,000	Berpengaruh Signifikan
Leverage (LEV)	-8,522	-0,823	0,416	Tidak Berpengaruh
Size (SZ)	0,053	0,397	0,693	Tidak Berpengaruh
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-0,032	-1,411	0,166	Tidak Berpengaruh
F-hitung = 7,676				
Adjusted R Square = 0,443				
*Signifikan pada $\alpha = 5\%$				

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2016

Hasil Analisis Regresi

Berdasar hasil uji statistik regresi linier berganda, dapat disusun persamaan matematik sebagai berikut:

$$KKPD = -0,291 + 1,774 BM - 1,874 IR - 8,522 LEV + 0,053 SZ - 0,032 PAD + \epsilon$$

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa data penelitian ini terdistribusi dengan normal serta penelitian ini bebas dari gejala multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

Secara simultan, variabel independen (belanja modal, *inetrgovernmental revenue*, *leverage*, *size* dan pendapatan asli daerah berpengaruh sebesar 44,30% (*adjusted-R*²= 0,443) dalam menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hasil pengujian juga menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik dengan nilai *F*_{hitung} sebesar 7,676 dan nilai signifikan 0,000.

Hasil Uji Hipotesis

- Berdasarkan hipotesis pertama yang diajukan oleh peneliti menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dijelaskan pula dalam hasil analisis regresi bahwa variabel belanja modal mempunyai nilai *t*_{-hitung} 4,107 lebih besar dari *t*_{-tabel} 1,681 dan diperoleh nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,016 < 0,05). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.
- Variabel *Intergovernmental revenue* mempunyai nilai *t*_{-hitung} -3,837 lebih besar dari *t*_{-tabel} 1,681 Dan diperoleh nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Intergovernmental*

revenue berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, maka hipotesis diterima.

- c. Hipotesis ketiga dijelaskan dalam variabel *leverage* (LEV) yang mempunyai nilai $t_{\text{-hitung}} -0,823$ lebih kecil dari $t_{\text{-tabel}} 1,681$ dan diperoleh nilai signifikansi $0,416$ lebih besar dari taraf signifikansi $0,05$ ($0,416 > 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, maka hipotesis ditolak.
- d. Hasil pengujian untuk hipotesis keempat menunjukkan bahwa *size* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. *Size* mempunyai nilai $t_{\text{-hitung}} -0,397$ lebih kecil dari $t_{\text{-tabel}} 1,681$ dan diperoleh nilai signifikansi $0,698$ lebih besar dari taraf signifikansi $0,05$ ($0,698 > 0,05$). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak.
- e. Variabel Pendapatan asli daerah mempunyai nilai $t_{\text{-hitung}} -1,411$ lebih besar dari $t_{\text{-tabel}} 1,641$ dan diperoleh nilai signifikansi $0,166$ lebih besar dari taraf signifikansi $0,05$ ($0,166 > 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, maka hipotesis ditolak.

C. PEMBAHASAN

a. Hubungan Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Belanja modal daerah dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan realisasi belanja modal dan total realisasi belanja. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa hipotesis pertama, ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti semakin besar belanja modal, maka semakin tinggi kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya jumlah belanja modal yang tinggi, maka pelaksanaan kinerja terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal. Belanja modal disini juga mampu menunjukkan adanya pengeluaran yang produktif dan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil dari analisis penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dan arah koefisiennya konsisten yaitu berpengaruh positif. Penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Simanullang (2013) dan Sudarsono (2013) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota, dan juga Utomo (2015) dan Mustikarini (2012) yang menyimpulkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

b. Hubungan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Intergovernmental revenue yang diukur dengan dana perimbangan terhadap total pendapatan. Hasil uji regresi untuk hipotesis kedua menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti semakin besar tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, maka semakin rendah kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut. Utomo (2015) menyatakan salah satu fenomena *flypaper effects* menyiratkan bahwa pemerintah daerah yang lebih bergantung pada Dana Perimbangan daripada PAD merupakan daerah yang mampu mengelola kekayaan sumber dayanya secara lebih efisien dan ekonomis, namun juga memiliki tingkat kemandirian yang lebih rendah karena ketergantungannya pada dana transfer dari pusat.

Hasil dari analisis penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dan arah koefisiennya konsisten yaitu berpengaruh negatif, penelitian ini mendukung penelitian dari Simanullang (2013) yang menyimpulkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda kabupaten/kota. Tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Minarsih (2015) dan Sesotyaningtyas (2012) yang menyimpulkan bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda kabupaten/kota.

c. **Hubungan *Leverage* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Leverage diukur dengan kepemilikan utang terhadap modal yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah. Hasil uji regresi untuk hipotesis ketiga menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa memiliki dana yang kuat untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya tanpa bergantung pada pinjaman atau hutang.

Hasil dari analisis penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan, serta mendukung penelitian yang dilakukan oleh Minarsih (2015), Kusumawardani (2012), dan Sesotyaningtyas (2012) yang menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Utomo (2015) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

d. **Hubungan *Size* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Size atau ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus logaritma natural (Ln) dari total aset. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa hipotesis keempat, *size* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hasil pengujian ini berarti tidak sesuai dengan teori dimana seharusnya semakin besar ukuran daerah, maka semakin tinggi kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya jumlah ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset Pemda yang tinggi, maka pelaksanaan kinerja terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal.

Hasil dari analisis penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan, serta mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana (2013) yang menyatakan bahwa ukuran Pemda tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota. Tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Mustikarini (2012) dan Kusumawardani (2012) yang menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh.

e. **Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Pendapatan asli daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan asli daerah dengan total realisasi pendapatan. Hasil uji regresi untuk hipotesis kelima menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti semakin rendah pendapatan asli daerah, maka semakin rendah kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kondisi tersebut dikarenakan pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa masih terlalu kecil. PAD dianggap masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan yang diberikan oleh pusat. Sehingga PAD memiliki kontribusi yang kecil dalam mendukung kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil dari analisis penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan, serta tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Julitawati (2012) dan Simanullang (2012) yang menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi (BM) $0,000 < 0,05$ sehingga H1 diterima.
2. *Intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi (IR) $0,000 < 0,05$ sehingga H2 ditolak.
3. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi (LEV) $0,416 > 0,05$ sehingga H3 ditolak.
4. *Size* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi (SZ) $0,0,693 > 0,05$ sehingga H4 ditolak.
5. Pendapatan Asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi (PAD) $0,166 > 0,05$ sehingga H5 ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra dan Gatot Soepriyanto. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jultawati, Ebit. Darwanis dan Jalaludin. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Peimbnagn Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kta di Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi Volume 1, No. 1, Agustus 2012
- Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kusumawardani, Media. 2012. *Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Accounting Analysis Journal 1. Universitas Negeri Semarang.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Kinerja Sektor Pengukuran Publik*. Yogyakarta: BPF
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Debby Fitriyani. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotadi Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin.
- Minarsih, Ratna Ayu. 2015. *Pengaruh Size, Wealth, Leverage Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Surepno. 2013. *Pengaruh Return on Equity (ROE), Ukuran (Size) dan Kemakmuran (Wealth) Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Patrick, Patricia A. (2007), *The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government*. Ph.D. dissertation, The Pennsylvania State

- University, United States – Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from Accounting & Tax Periodicals. (Publication No. AAT 3266180).
- Peraturan Pemerintah No. 24. 2005. Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 33/PMK.07/2015 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
- Sudarsana, Hafidh Sudarsana. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Ejournal s1.undip.ac.id/index.php/accounting Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, Halaman 1-13.
- Simanullang, Gideon. 2013. *Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental, Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2012*. Umarah Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 1, Tahun 2013 Halaman 1-24.
- Sesotyaningtyas, Mirna. 2012. *Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Accounting Analysis Journal 1. Universitas Negeri Semarang.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2004. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Utomo, Kharis Presetyo. 2015. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2012)*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.